

**STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF KOTA SUNGAI PENUH
MELALUI PENGUATAN RANTAI NILAI SEKTOR PERTANIAN DAN
PERDAGANGAN**

Rafmil Kurniawan

Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

Email Korespondensi: rafmilkurniawan@gmail.com

ABSTRACT

This policy paper examines the quality of economic growth in Sungai Penuh City, which remains insufficiently inclusive despite being primarily driven by the agricultural and trade sectors as the main contributors to regional GDP. The key issues include low value-added in the agricultural sector, weak value chain linkages among agriculture, MSMEs, and trade, as well as limited economic infrastructure and cross-sectoral coordination. These conditions result in uneven distribution of economic benefits, as reflected in the relatively slow decline of poverty and income inequality. This paper employs a descriptive qualitative approach using USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis to determine priority issues, combined with policy analysis based on William N. Dunn's evaluative criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that strengthening the linkage between agriculture, MSMEs, and trade through the development of a local economic value chain is the most optimal policy alternative. This approach is considered effective in increasing local value-added, strengthening intersectoral integration, and expanding the distribution of economic benefits across society. Policy implementation is directed toward strengthening partnerships among economic actors, developing commodity-based economic clusters, improving human resource capacity, and enhancing integrated infrastructure and governance systems. Therefore, the development of local economic value chains serves as a key strategy to promote more inclusive, sustainable, and competitive economic growth in Sungai Penuh City.

Keywords: Inclusive economic growth, Local value chain, Agriculture; MSMEs; Trade.

ABSTRAK

Policy paper ini menganalisis kualitas pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai Penuh yang belum sepenuhnya inklusif meskipun didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan sebagai kontributor utama PDRB. Permasalahan utama terletak pada rendahnya nilai tambah sektor pertanian, lemahnya keterkaitan rantai nilai antara sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi dan koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata, yang tercermin dari penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang relatif lambat. Makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas masalah, serta analisis kebijakan menggunakan kriteria evaluatif William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan keterkaitan sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan melalui pengembangan rantai nilai ekonomi lokal merupakan alternatif kebijakan paling optimal. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, memperkuat integrasi antar sektor, serta memperluas distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Implementasi kebijakan diarahkan pada penguatan kemitraan antar pelaku ekonomi, pengembangan klaster berbasis komoditas unggulan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur dan tata kelola kebijakan yang terintegrasi. Dengan demikian, pengembangan rantai nilai ekonomi lokal menjadi strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di Kota Sungai Penuh.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi inklusif, Rantai nilai lokal, Sektor pertanian, UMKM, Perdagangan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

185

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan Pembangunan (Bappenas, 2023). Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Sari, 2022). Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi sering kali hanya tercermin pada peningkatan output agregat seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tanpa diikuti distribusi manfaat yang adil. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang inklusif, yaitu kemampuan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Kedua sektor ini memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi daerah karena menyumbang lebih dari 40 persen terhadap PDRB. Namun demikian, dominasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menunjukkan penurunan yang relatif lambat, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif.

Untuk memperkuat gambaran empiris terkait struktur dan kinerja perekonomian daerah, indikator utama ekonomi Kota Sungai Penuh selama periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Ringkasan Indikator Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,4	23,1	22,8	22,4	22,1	Tetap menjadi sektor dominan
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	18,2	18,5	19	19,3	19,6	Sektor utama kedua
Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,4	7,3	7,2	7,1	7	Nilai tambah masih rendah
Rasio Gini	0,351	0,347	0,342	0,338	0,336	Ketimpangan menurun lambat
Tingkat Kemiskinan (%)	5,63	5,42	5,21	5,08	4,95	Menurun, namun masih ada
Tenaga kerja sektor pertanian (%)	-	-	-	-	35	Konsentrasi tinggi
Tenaga kerja sektor perdagangan (%)	-	-	-	-	25	Konsentrasi tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh, diolah (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Sungai Penuh masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan, sementara kontribusi sektor industri pengolahan relatif kecil dan cenderung menurun. Di sisi lain, penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan berlangsung secara bertahap namun relatif lambat, serta sebagian besar tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor dengan produktivitas rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berkualitas dan inklusif karena belum mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan karakteristik struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada aktivitas ekonomi primer. Sektor pertanian sebagai kontributor utama masih didominasi

oleh produksi bahan mentah dengan tingkat pengolahan yang terbatas, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah. Di sisi lain, sektor perdagangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan penguatan produksi lokal, sehingga belum mampu mendorong peningkatan nilai ekonomi secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi struktural ekonomi daerah belum berjalan optimal.

Selain itu, peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penghubung antara sektor pertanian dan perdagangan belum berkembang secara optimal. Keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas usaha, serta rendahnya integrasi dengan rantai pasok dan pasar menyebabkan UMKM belum mampu berperan maksimal dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lokal. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur ekonomi dan lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam satu sistem ekonomi daerah yang utuh.

Dengan demikian, permasalahan utama pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh tidak hanya terletak pada tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi pada belum optimalnya kualitas pertumbuhan yang inklusif. Lemahnya keterkaitan antar sektor ekonomi, rendahnya nilai tambah, serta belum terintegrasinya kebijakan pembangunan ekonomi menyebabkan potensi ekonomi daerah belum mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang terarah untuk memperkuat keterkaitan sektor pertanian dan perdagangan melalui pengembangan rantai nilai ekonomi lokal sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, maka struktur ekonomi daerah berpotensi tetap didominasi oleh sektor berproduktivitas rendah, yang tidak hanya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berisiko memperluas ketimpangan, melemahkan daya saing daerah, serta menghambat transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang, pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh menghadapi sejumlah persoalan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berkualitas dan inklusif. Meskipun sektor pertanian dan perdagangan menjadi penopang utama perekonomian, manfaat pertumbuhan yang dihasilkan belum mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan secara lebih terarah dan terintegrasi.

Berdasarkan kondisi faktual dan analisis terhadap struktur ekonomi daerah, permasalahan utama yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini tercermin dari masih bertahannya tingkat kemiskinan serta ketimpangan pendapatan yang menurun relatif lambat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang belum mampu menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang adil, sehingga pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

2. Sektor pertanian sebagai sektor dominan masih berproduktivitas dan bernilai tambah rendah

Sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian daerah masih didominasi oleh aktivitas produksi primer dengan tingkat pengolahan yang terbatas. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa hasil pertanian belum dikembangkan secara optimal menjadi produk bernilai tambah. Akibatnya, meskipun sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih relatif rendah.

3. Kelembagaan UMKM dan keterkaitan rantai nilai pertanian–perdagangan belum kuat

Peran UMKM sebagai penghubung antara sektor pertanian dan perdagangan belum berkembang secara optimal. Keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas usaha, serta rendahnya integrasi dengan rantai pasok menyebabkan UMKM belum mampu mendorong pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk lokal secara efektif. Kondisi ini mengakibatkan rantai nilai ekonomi daerah belum terbentuk secara kuat, sehingga potensi ekonomi lokal belum memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

4. Infrastruktur ekonomi dan koordinasi lintas sektor belum mendukung pengembangan ekonomi daerah secara terpadu.

Keterbatasan infrastruktur ekonomi, seperti fasilitas pasar, sistem logistik, dan sarana distribusi, masih menjadi hambatan dalam mendukung efisiensi aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, pelaksanaan program pembangunan ekonomi masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara optimal antar perangkat daerah. Kondisi ini menyebabkan pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM belum berjalan secara sinergis dalam satu kerangka pembangunan ekonomi daerah yang terpadu.

Secara keseluruhan, keempat permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh tidak hanya terletak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada belum optimalnya keterkaitan antar sektor, rendahnya nilai tambah ekonomi, serta belum terintegrasinya kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penentuan prioritas masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang paling strategis sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif di Kota Sungai Penuh.

METODE

Analisis dalam *policy paper* ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang bersifat deskriptif-analitis dengan mengombinasikan beberapa teknik analisis untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan alternatif kebijakan, serta menentukan kebijakan yang paling tepat. Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), yang menilai tingkat urgensi, tingkat keseriusan, dan potensi perkembangan suatu masalah. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang paling mendesak dan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya, analisis terhadap alternatif kebijakan dilakukan menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masing-masing alternatif kebijakan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi keberhasilan dan risiko implementasi kebijakan. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan, digunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Penilaian dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang relevan, kemudian direkapitulasi untuk memperoleh alternatif kebijakan dengan nilai terbaik.

PEMBAHASAN

Kerangka Teori

Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan analitis untuk memahami permasalahan pembangunan ekonomi daerah serta menentukan alternatif kebijakan yang tepat. Pendekatan yang digunakan meliputi Teori Implementasi Kebijakan oleh Edwards (1980), Teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008), serta Teori Analisis Kebijakan oleh Dunn (2018). Ketiganya saling melengkapi dalam menjelaskan aspek implementasi, kolaborasi antaraktor, dan evaluasi alternatif kebijakan guna mendorong pembangunan ekonomi inklusif di Kota Sungai Penuh.

1. Teori Implementasi Kebijakan (Edwards, 1980)

(Edwards, 1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan, sumber daya mencakup dukungan anggaran, SDM, dan sarana, disposisi mencerminkan komitmen pelaksana, sedangkan struktur birokrasi menentukan efektivitas koordinasi dan prosedur kerja (Edwards, 1980).

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, kelemahan pada salah satu variabel tersebut dapat menyebabkan kebijakan berjalan tidak optimal, parsial, dan kurang berdampak. Oleh karena itu, teori

ini digunakan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi serta menilai kesiapan pelaksanaan kebijakan (Edwards, 1980).

2. Teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008)

(Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara formal, berbasis konsensus, dan berorientasi pada penyelesaian masalah bersama. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

Dalam pembangunan ekonomi daerah, kolaborasi antaraktor seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghindari fragmentasi kebijakan. Tanpa kolaborasi yang efektif, kebijakan cenderung tidak terintegrasi dan sulit menghasilkan dampak sistemik. Teori ini digunakan untuk menilai pentingnya sinergi lintas sektor dan actor (Ansell & Gash, 2008).

3. Teori Analisis Kebijakan (Dunn, 2018)

(Dunn, 2018) memandang kebijakan publik sebagai proses rasional yang memerlukan analisis sistematis untuk menghasilkan alternatif kebijakan terbaik. Evaluasi dilakukan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2018).

Dalam kajian ini, teori Dunn digunakan untuk membandingkan dan memilih alternatif kebijakan yang paling layak dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Pendekatan ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan bersifat rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Dunn, 2018).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan konsep utama yang menjadi dasar analisis dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh, meliputi pertumbuhan ekonomi inklusif, nilai tambah ekonomi daerah, keterkaitan sektor pertanian–perdagangan–UMKM, serta dukungan infrastruktur dan tata kelola kebijakan. Kerangka ini menghubungkan aspek kebijakan dengan struktur ekonomi riil daerah agar analisis tetap kontekstual.

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan tidak hanya meningkatkan output (PDRB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan (OECD, 2018; Rusu & Oprean-Stan, 2025). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan diukur dari distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya petani, pedagang, dan pelaku UMKM (Mkrtchyan, 2025; Yeboah, 2023).

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, pertumbuhan inklusif mensyaratkan sektor pertanian dan perdagangan tidak hanya berkontribusi terhadap PDRB, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. Nilai Tambah Ekonomi Daerah

Nilai tambah ekonomi daerah merupakan peningkatan nilai ekonomi produk melalui pengolahan, distribusi, dan pemasaran dalam rantai nilai (Savescu, 2024). Konsep ini menekankan bahwa pembangunan tidak cukup berbasis produksi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Di Kota Sungai Penuh, rendahnya pengolahan hasil pertanian menyebabkan manfaat ekonomi belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan nilai tambah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan (Savescu, 2024).

3. Keterkaitan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan UMKM

Keterkaitan sektor ekonomi menggambarkan hubungan antar sektor dalam sistem rantai nilai yang saling mendukung (FAO, 2024; Michalscheck, 2024), pertanian berperan sebagai basis produksi, perdagangan sebagai distribusi, dan UMKM sebagai pengolah nilai tambah (Jaweng, 2016; Suseno, 2020).

Keterkaitan yang kuat akan meningkatkan produktivitas dan pemerataan manfaat ekonomi (Ibnu, 2022; Purba, 2025). Sebaliknya, lemahnya keterkaitan menyebabkan ekonomi berjalan parsial dan kurang optimal.

4. Infrastruktur Ekonomi dan Tata Kelola Kebijakan

Infrastruktur ekonomi mencakup sarana pendukung produksi, distribusi, dan perdagangan seperti jalan, pasar, dan logistic (UNIDO, 2025). Sementara itu, tata kelola kebijakan mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan implementasi kebijakan.

Keduanya menentukan efektivitas pengembangan ekonomi daerah. Tanpa infrastruktur dan tata kelola yang baik, potensi ekonomi sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penguatan keduanya menjadi prasyarat pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Union, 2024).

5. Kerangka Konseptual Policy Paper

Pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Sungai Penuh mensyaratkan peningkatan nilai tambah ekonomi, penguatan keterkaitan sektor pertanian–perdagangan–UMKM, serta dukungan infrastruktur dan tata kelola kebijakan. Pembangunan ekonomi tidak cukup berbasis peningkatan output, tetapi harus terintegrasi dalam sistem rantai nilai yang mampu meningkatkan efisiensi dan pemerataan manfaat ekonomi.

Integrasi sektor produksi, distribusi, dan pengolahan terbukti meningkatkan efisiensi dan dampak ekonomi (Cahyaningrum & al., 2025; Gunawan & al., 2021), sementara penguatan UMKM berperan dalam pemerataan dan penciptaan nilai tambah lokal (Yolanda, 2024).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, terdapat beberapa persoalan utama yang memengaruhi kualitas pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh. Namun demikian, tidak seluruh masalah tersebut dapat ditangani secara bersamaan dalam satu kerangka kebijakan yang terfokus. Oleh karena itu, diperlukan penentuan prioritas masalah agar analisis dan rekomendasi kebijakan yang disusun dalam *policy paper* ini memiliki fokus yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Penentuan prioritas masalah dalam kajian ini dilakukan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Metode ini digunakan untuk menilai tingkat prioritas suatu masalah berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: *urgency* (tingkat kedaruratan masalah untuk segera ditangani), *seriousness* (tingkat keseriusan dampak masalah terhadap pembangunan daerah), dan *growth* (potensi perkembangan atau memburuknya masalah apabila tidak segera diintervensi). Setiap aspek diberi skor pada rentang 1–5, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat prioritas yang lebih besar. Dalam hal ini, penulis melibatkan aparatur sipil negara (ASN) pada perangkat daerah pengampu sektor ekonomi, khususnya sektor pertanian dan perdagangan di Kota Sungai Penuh, sebagai narasumber yang memiliki keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta memahami secara mendalam kondisi dan permasalahan sektor tersebut yaitu 1. Perencana Ahli Madya di Bapperida Kota Sungai Penuh yang tergabung dalam mitra perencanaan SKPD pengampu urusan Sektor Ekonomi, Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan; 2. Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 3. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh; dan 4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Hasil Wawancara Responden

No	Sumber Masalah	Responden I				Responden II				Responden III				Responden IV			
		U	S	G	T	U	S	G	T	U	S	G	T	U	S	G	T
1	Pertumbuhan ekonomi daerah belum	5	4	5	14	5	5	5	15	4	4	5	13	4	4	5	13

	sepenuhnya inklusif																
2	Sektor pertanian sebagai sektor dominan masih berproduktivitas dan bernilai tambah rendah	4	4	4	12	4	3	3	10	3	5	3	11	3	5	3	11
3	Kelembagaan UMKM dan keterkaitan rantai nilai pertanian-perdagangan belum kuat	4	4	3	11	4	5	3	12	4	3	3	10	4	3	3	10
4	Infrastruktur ekonomi dan koordinasi lintas sektor belum mendukung pengembangan ekonomi daerah secara terpadu	4	3	3	10	3	3	3	9	5	3	4	12	5	3	4	12

Sumber: Hasil Wawancara (T: Total nilai)

Masalah Utama, Pohon Permasalahan, dan Pernyataan Masalah

Berdasarkan hasil penilaian USG oleh empat responden, masalah dengan bobot tertinggi adalah Pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif dengan total nilai 54 seperti pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Rekap Hasil Penilaian USG oleh Empat Responden

No	Masalah	U	S	G	Total	Peringkat
1	Pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif	18	16	20	54	1
2	Sektor pertanian sebagai sektor dominan masih berproduktivitas dan bernilai tambah rendah	14	15	13	42	4
3	Kelembagaan UMKM dan keterkaitan rantai nilai pertanian-perdagangan belum kuat	16	17	12	45	2
4	Infrastruktur ekonomi dan koordinasi lintas sektor belum mendukung pengembangan ekonomi daerah secara terpadu	17	14	14	45	3

Sumber: Hasil Wawancara (T: Total nilai)

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara dengan para responden, penyebab masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Penyebab Masalah Level 1

- Rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, yang ditunjukkan oleh terbatasnya penggunaan teknologi, inovasi, serta pengolahan hasil pertanian.
- Lemahnya kelembagaan UMKM dan keterkaitan rantai nilai pertanian–perdagangan, yang ditunjukkan oleh belum terbangunnya integrasi yang kuat antara pelaku usaha dari hulu ke hilir.
- Infrastruktur ekonomi belum memadai, yang ditunjukkan oleh keterbatasan sarana distribusi, akses pasar, serta fasilitas pendukung kegiatan ekonomi lokal.
- Koordinasi lintas sektor belum optimal, yang ditunjukkan oleh belum terintegrasinya program dan kebijakan antar perangkat daerah.

Penyebab Masalah Level 2

- Akses teknologi dan inovasi di sektor pertanian masih terbatas, yang ditunjukkan oleh rendahnya adopsi teknologi modern.
- Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM masih terbatas, yang ditunjukkan oleh kesulitan memperoleh modal usaha.
- Kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi masih rendah, khususnya dalam pengolahan, manajemen usaha, dan pemasaran.
- Digitalisasi sektor ekonomi belum optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pemasaran dan distribusi.
- Sinergi kebijakan antar sektor belum berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh program yang masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka problem statement yang diangkat dalam policy paper ini adalah:

“Permasalahan utama pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh bukan terletak pada kinerja masing-masing sektor, melainkan pada belum terbangunnya integrasi rantai nilai sektor pertanian–UMKM–perdagangan yang efektif, sehingga nilai tambah ekonomi rendah dan distribusi manfaat pembangunan belum merata.”

Rumusan masalah ini menegaskan bahwa persoalan utama pembangunan ekonomi daerah tidak hanya terletak pada tingkat pertumbuhan, tetapi pada belum terbentuknya sistem ekonomi lokal yang terintegrasi dan bernilai tambah. Kondisi ini menghambat pemerataan manfaat ekonomi serta membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian selanjutnya akan difokuskan pada strategi penguatan rantai nilai ekonomi lokal melalui integrasi sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas keterkaitan antar permasalahan serta mengidentifikasi hubungan sebab-akibat secara lebih sistematis, dilakukan pemetaan permasalahan dalam bentuk pohon masalah. Pemetaan ini digunakan untuk menggambarkan struktur permasalahan utama beserta faktor-faktor penyebabnya pada berbagai tingkatan, sehingga memudahkan dalam penentuan arah kebijakan yang tepat. Hasil pemetaan tersebut disajikan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1: Pohon Permasalahan



Gambar 1 menunjukkan bahwa permasalahan utama pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh terletak pada lemahnya integrasi rantai nilai antara sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan, sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor level pertama, yaitu rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, lemahnya kelembagaan UMKM, keterbatasan infrastruktur ekonomi, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

Faktor-faktor tersebut berakar pada permasalahan level kedua, seperti keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya digitalisasi, serta lemahnya sinergi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan.

Dengan demikian, perbaikan pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan integrasi rantai nilai ekonomi lokal menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi daerah yang lebih produktif, terhubung, dan mampu menyebarkan manfaat pembangunan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh, diperlukan alternatif kebijakan yang mampu menjawab persoalan secara lebih terarah, realistis, dan terintegrasi. Alternatif kebijakan dalam *policy paper* ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah agar lebih inklusif melalui penguatan sektor pertanian dan perdagangan sebagai basis utama ekonomi lokal.

Dalam kerangka tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang lebih lanjut dianalisis dengan metode SWOT. Ketiga alternatif kebijakan ini disusun sebagai pilihan strategis yang saling melengkapi, namun memiliki fokus intervensi

yang berbeda dalam menjawab permasalahan utama, yaitu lemahnya integrasi rantai nilai ekonomi daerah

1. Alternatif Kebijakan I: Penguatan Nilai Tambah Sektor Pertanian Berbasis Hilirisasi Lokal

Alternatif kebijakan pertama adalah penguatan nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi ekonomi lokal. Alternatif ini berangkat dari permasalahan bahwa sektor pertanian sebagai salah satu kontributor utama perekonomian Kota Sungai Penuh masih didominasi oleh aktivitas produksi primer, sehingga hasil pertanian sebagian besar dipasarkan dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi yang relatif terbatas.

Melalui alternatif ini, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah dari hasil pertanian lokal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan pengolahan hasil pertanian skala lokal, diversifikasi produk, peningkatan kualitas pengemasan, penguatan standar mutu, serta fasilitasi pemasaran produk olahan. Dengan demikian, hasil pertanian tidak hanya berhenti pada proses produksi, tetapi dapat berkembang menjadi produk ekonomi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha tani, memperluas peluang usaha baru, serta menciptakan aktivitas ekonomi turunan di daerah. Selain itu, hilirisasi lokal juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada penjualan komoditas mentah dan memperkuat daya saing produk daerah. Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, alternatif ini relevan karena berpotensi memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat yang selama ini terlibat langsung dalam sektor pertanian.

Namun demikian, implementasi alternatif ini memerlukan dukungan yang cukup kuat, terutama dalam bentuk peningkatan kapasitas pelaku usaha, dukungan kelembagaan, pembiayaan, akses teknologi, serta pengembangan pasar. Oleh karena itu, meskipun alternatif ini sangat strategis, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukung di tingkat daerah.

2. Alternatif Kebijakan II: Integrasi Sektor Pertanian, Perdagangan, dan UMKM melalui Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Lokal

Alternatif kebijakan kedua adalah penguatan keterkaitan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM melalui pengembangan rantai nilai ekonomi lokal. Alternatif ini berangkat dari kenyataan bahwa struktur ekonomi Kota Sungai Penuh masih menunjukkan lemahnya hubungan fungsional antara sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran, sehingga manfaat ekonomi lokal belum berputar secara optimal di dalam daerah.

Arah kebijakan ini difokuskan pada pembentukan dan penguatan hubungan yang lebih terintegrasi antara pelaku pertanian, UMKM, dan perdagangan lokal. Dalam kerangka ini, hasil pertanian lokal tidak hanya diproduksi dan dijual, tetapi juga diolah oleh UMKM lokal, dipasarkan melalui jaringan perdagangan daerah, dan dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang saling terhubung. Dengan kata lain, alternatif ini tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi pada penguatan rantai nilai ekonomi daerah secara keseluruhan.

Implementasi alternatif ini dapat dilakukan melalui fasilitasi kemitraan antara petani, pelaku UMKM, dan pedagang; pengembangan sentra produk unggulan; penguatan pasar lokal berbasis produk daerah; peningkatan kapasitas usaha; serta dukungan promosi dan pemasaran produk lokal. Alternatif ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun model pengembangan ekonomi yang lebih terintegrasi dan berbasis potensi lokal.

Dari sudut pandang pembangunan ekonomi inklusif, alternatif ini memiliki keunggulan karena manfaat ekonominya cenderung lebih tersebar. Tidak hanya petani yang memperoleh manfaat, tetapi juga pelaku UMKM, pedagang, tenaga kerja lokal, dan kelompok usaha kecil lainnya. Selain itu, alternatif ini juga lebih sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah yang tidak hanya menuntut peningkatan produksi, tetapi juga integrasi antar sektor ekonomi.

Meskipun demikian, alternatif ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antaraktor yang cukup kuat. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, integrasi rantai nilai lokal akan sulit terbentuk secara efektif.

3. Alternatif Kebijakan III: Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Tata Kelola Kolaboratif Pembangunan Ekonomi Daerah

Alternatif kebijakan ketiga adalah penguatan infrastruktur ekonomi dan tata kelola kolaboratif pembangunan ekonomi daerah. Alternatif ini berangkat dari pemahaman bahwa pengembangan ekonomi lokal tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sarana-prasarana ekonomi yang memadai dan sistem kebijakan yang terintegrasi.

Dalam alternatif ini, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan dukungan infrastruktur ekonomi seperti pasar, jalan produksi, sarana distribusi, fasilitas penyimpanan, serta sistem logistik yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, alternatif ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola kebijakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, sinkronisasi program pembangunan ekonomi, serta pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Keunggulan dari alternatif ini adalah kemampuannya untuk memperbaiki ekosistem pendukung pembangunan ekonomi daerah secara lebih sistemik. Dengan dukungan infrastruktur dan tata kelola yang lebih baik, sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM akan memiliki lingkungan yang lebih kondusif untuk berkembang. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini dapat memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.

Namun demikian, alternatif ini cenderung memerlukan sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi pembiayaan, waktu implementasi, maupun kapasitas koordinasi birokrasi. Selain itu, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung lebih bersifat tidak langsung dibandingkan dengan kebijakan yang menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih dekat. Oleh karena itu, meskipun sangat penting sebagai fondasi jangka panjang, alternatif ini perlu dirancang agar tetap memiliki keterhubungan langsung dengan kebutuhan pelaku ekonomi lokal.

3 Analisis Perbandingan Alternatif Kebijakan

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling layak dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif di Kota Sungai Penuh, ketiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan perlu dibandingkan secara sistematis. Dalam *policy paper* ini, analisis perbandingan alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penggunaan kriteria ini penting agar pemilihan kebijakan tidak dilakukan secara intuitif, melainkan berdasarkan pertimbangan rasional mengenai sejauh mana suatu alternatif mampu menjawab masalah, realistis untuk diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan menggunakan kerangka tersebut, masing-masing alternatif kebijakan dapat dinilai berdasarkan kelebihan dan keterbatasannya dalam konteks Kota Sungai Penuh, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Untuk menjamin objektivitas, keempat narasumber dalam identifikasi permasalahan kembali dilibatkan melalui wawancara semi-terstruktur. Responden diminta memberikan penilaian skala 1–10 terhadap masing-masing alternatif kebijakan, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam pertimbangan penilaian. Secara khusus, aspek responsivitas difokuskan pada kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan pelaku ekonomi lokal, seperti petani, pelaku UMKM, dan sektor perdagangan. Hasil analisis kelayakan untuk setiap alternatif kebijakan direkapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4: Rekap Total Nilai

Responden	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
R1	48	49	41
R2	44	45	42
R3	45	47	40
R4	45	45	42
TOTAL NILAI	182	186	165

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 4, alternatif kebijakan kedua, yaitu “integrasi sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM melalui pengembangan rantai nilai ekonomi local”, memperoleh skor tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif tersebut paling unggul dari aspek efektivitas, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan implementasi.

Keunggulan alternatif II terletak pada kemampuannya menargetkan akar permasalahan secara langsung, yaitu lemahnya keterhubungan antar sektor dalam rantai nilai ekonomi daerah. Sementara itu, alternatif I lebih berfokus pada peningkatan nilai tambah sektor pertanian, dan alternatif III menitikberatkan pada infrastruktur dan tata kelola, sehingga keduanya cenderung bersifat parsial dan belum mampu membangun keterpaduan sistem ekonomi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada kinerja masing-masing sektor, tetapi pada lemahnya integrasi antar sektor dalam sistem ekonomi daerah.

Melalui pendekatan integrasi, alternatif II mampu menghubungkan sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran dalam satu sistem yang saling terkoordinasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal serta mendorong perputaran ekonomi di dalam daerah secara lebih optimal. Implikasinya, pendekatan kebijakan perlu bergeser dari pola sektoral menuju integrasi lintas sektor yang lebih terarah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis komparatif alternatif kebijakan, “penguatan keterkaitan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM melalui pengembangan rantai nilai ekonomi lokal” ditetapkan sebagai kebijakan utama dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif di Kota Sungai Penuh.

Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa alternatif tersebut memiliki kemampuan paling komprehensif dalam menjawab akar permasalahan pembangunan ekonomi daerah. Melalui pendekatan rantai nilai ekonomi lokal, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penghasil komoditas, tetapi juga terhubung dengan proses pengolahan oleh UMKM dan distribusi melalui sektor perdagangan, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih terintegrasi.

Dalam implementasinya, rekomendasi kebijakan ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa arah kebijakan utama. Pertama, penguatan kemitraan antara petani, pelaku UMKM, dan pedagang lokal melalui fasilitasi kerja sama produksi, pengolahan, dan pemasaran produk daerah. Kedua, pengembangan sentra produk unggulan daerah yang berbasis pada potensi lokal, sehingga mampu menciptakan kluster ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing. Ketiga, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, baik dari sisi produksi, pengolahan, manajemen usaha, maupun pemasaran, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Keempat, penguatan akses pasar dan promosi produk lokal, baik melalui pengembangan pasar tradisional, pemanfaatan teknologi digital, maupun dukungan promosi dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada penciptaan sistem ekonomi lokal yang lebih terhubung, bernilai tambah, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Berdasarkan analisis dan evaluasi, strategi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

196

Indexed



SINTA 4



yang direkomendasikan adalah:

Tabel 5: Tahapan Implementasi Penguatan Keterkaitan Sektor Pertanian, Perdagangan, Dan UMKM Melalui Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Lokal

Tahapan	Fokus	Langkah-langkah
Jangka Pendek (1–2 Tahun)	Penguatan dasar kelembagaan dan infrastruktur pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan komoditas unggulan pertanian dan potensi perdagangan per kecamatan. • Revitalisasi pasar daerah dan pembangunan fasilitas penyimpanan hasil pertanian. • Penetapan kebijakan koordinasi lintas sektor melalui regulasi daerah untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan program pertanian, perdagangan, dan UMKM. • Pengembangan koperasi produksi dan unit agroindustri skala kecil sebagai dasar penguatan nilai tambah. • Akselerasi digitalisasi UMKM melalui integrasi sistem pemasaran digital dan perluasan akses pembiayaan inklusif.
Jangka Menengah (3–5 Tahun)	Pembentukan dan penguatan kluster ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kluster pertanian–perdagangan di setiap kecamatan. • Pendirian koperasi produksi dan unit pengolahan hasil pertanian (agroindustri kecil). • Implementasi sistem <i>e-commerce</i> daerah untuk produk lokal (terintegrasi dengan KUR Syariah). • Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan manajemen bisnis bagi UMKM. • Penetapan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kluster Ekonomi Inklusif Pertanian–Perdagangan sebagai payung hukum integrasi kebijakan lintas OPD. • Pengarahan kebijakan penganggaran daerah melalui integrasi APBD, DAK tematik, CSR, dan skema KPBU.
Jangka Panjang (5–10 Tahun)	Transformasi struktur ekonomi menuju ekonomi inklusif dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem rantai nilai pertanian–perdagangan berbasis teknologi. • Integrasi kluster ekonomi lokal dengan jaringan regional (Kerinci, Jambi, dan Sumatera Barat). • Peningkatan ekspor produk unggulan pertanian olahan. • Pembentukan Pusat Inovasi Ekonomi Daerah (<i>Regional Innovation Hub</i>). • Implementasi kebijakan fiskal daerah yang pro-UMKM (insentif pajak dan retribusi).

Sumber: Hasil Analisis

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, diperlukan pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pembagian peran tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6: Matriks Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Lokal

Aktor / Perangkat Daerah	Peran Utama	Fungsi Spesifik
Wali Kota Sungai Penuh	Pengarah kebijakan dan pengambil keputusan strategis	Menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi inklusif, mengesahkan regulasi (Perwako), serta memastikan integrasi lintas sektor berjalan efektif
Bapperida	Koordinator kebijakan	Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor, sinkronisasi program, dan monitoring implementasi kebijakan
Dinas Pertanian	Penguatan sektor produksi	Peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan komoditas unggulan, serta penerapan teknologi pertanian
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Penguatan distribusi dan pasar	Pengembangan pasar lokal, fasilitasi distribusi produk, serta promosi produk daerah
Dinas Koperasi dan UMKM	Penguatan kelembagaan usaha	Pembinaan UMKM, penguatan koperasi, peningkatan kapasitas usaha
Diskominfo	Dukungan digitalisasi	Pengembangan sistem pemasaran digital dan integrasi data ekonomi
BKAD & DPRD	Dukungan pembiayaan	Penganggaran dan integrasi sumber pembiayaan

Sumber: Hasil Analisis

Dengan demikian, implementasi kebijakan ini tidak hanya diharapkan meningkatkan kinerja ekonomi daerah, tetapi juga mentransformasi struktur ekonomi Kota Sungai Penuh menjadi sistem yang lebih terintegrasi, bernilai tambah, dan inklusif, sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

KESIMPULAN

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh perlu bergeser dari pendekatan sektoral menuju pendekatan yang lebih terintegrasi melalui penguatan rantai nilai ekonomi lokal. Pergeseran ini menjadi penting karena permasalahan utama pembangunan ekonomi daerah tidak hanya terletak pada kinerja masing-masing sektor, tetapi pada lemahnya keterhubungan antar sektor dalam sistem ekonomi lokal.

Integrasi antara sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan menjadi kunci dalam menciptakan nilai tambah serta memperluas distribusi manfaat ekonomi. Melalui keterkaitan yang lebih kuat, hasil produksi tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi berlanjut ke proses pengolahan dan pemasaran, sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang lebih optimal di dalam daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu, tetapi dapat tersebar kepada pelaku ekonomi lokal secara lebih luas.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta keterlibatan aktif pelaku ekonomi lokal. Tanpa dukungan tersebut, pendekatan integratif berpotensi menghadapi kendala dalam pelaksanaan,

terutama terkait sinkronisasi program dan kapasitas antar aktor. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kebijakan menjadi prasyarat utama dalam memastikan keberhasilan integrasi rantai nilai ekonomi lokal.

Dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini berpotensi mendorong transformasi struktur ekonomi daerah secara bertahap, dari ekonomi yang berbasis produksi primer menuju sistem ekonomi yang lebih terintegrasi, bernilai tambah, dan berdaya saing. Transformasi tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Sungai Penuh.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Cahyaningrum, & al., et. (2025). Integrasi rantai nilai pertanian dan ekonomi wilayah. *Jurnal Media Akademik*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- FAO. (2024). *Inclusive value chains for sustainable agriculture*. Food and Agriculture Organization.
- Gunawan, & al., et. (2021). Analisis efisiensi rantai nilai sektor pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*.
- Ibnu, M. (2022). Upgrading rantai nilai sektor pertanian di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Dan Ekonomi Pertanian*.
- Jaweng. (2016). Analisis rantai nilai usaha kakao sebagai produk unggulan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*.
- Michalscheck, M. (2024). An evaluative framework for inclusive agricultural value chain policies and interventions. *Global Food Security*.
- Mkrtchyan, T. (2025). Measuring Inclusive Growth in Developing Countries. *Journal of Risk and Financial Management*.
- OECD. (2018). *Opportunities for all: A framework for policy action on inclusive growth*. OECD Publishing.
- Purba, D. T. (2025). Peran UMKM dalam rantai nilai ekonomi lokal. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Rusu, R., & Oprean-Stan, C. (2025). *Determinants of inclusive economic growth: A global perspective*.
- Sari, D. P. (2022). Transformasi struktur ekonomi dan ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*.
- Savescu, R. F. (2024). Developing inclusive models of value chain financing. *Studies in Business and Economics*.
- Suseno, A. (2020). Analisis value chain management pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*.
- UNIDO. (2025). *Inclusive and sustainable agro-value chain development*. United Nations Industrial Development Organization.
- Union, A. (2024). *Guidelines for inclusive agricultural value chains development in Africa*. African Union Commission.
- Yeboah, E. N. (2023). Audit pricing puzzle: Do audit firm industry specialization and audit report lag matter? *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2172013>
- Yolanda. (2024). Peran UMKM dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.